

KAJIAN STUDI LITERATUR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Oleh : Mutiara¹, Ari Hendarto², Yozi Al Hafiz³

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Nasional

mutiara43@gmail.com ; muti005@brin.go.id

ABSTRAK

Status prevalensi stunting Indonesia berdasarkan SGGI tahun 2022 sebesar 21,6 persen melebihi batas yang ditetapkan WHO. Selain itu, bonus demografi 2030 yang diharapkan menjadi penggerak motor perekonomian, saat ini merupakan balita yang masuk dalam kategori stunting sebanyak 180 juta jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen sesuai RPJMN. Baik dukungan dari aspek regulasi maupun anggaran, akan tetapi untuk menangani permasalahan stunting ini memerlukan komitmen dan keterlibatan multipihak serta multi sektor. Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Kabupaten yang memiliki angka status stunting tertinggi sebesar 44,8 persen Bulan Februari 2022 juga telah menunjukkan upaya keras dalam mengatasi permasalahan stunting. Yaitu dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa, alokasi anggaran yang cukup besar berasal dari DAK fisik, DAK non fisik, serta APBDdes, dan telah dibentuk tim TPPS hingga ke level desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui studi literatur dan analisis kualitatif dari hasil konfirmasi bersama Kementerian Kesehatan, Bappenas, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya. Temuan dari penelitian ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya telah berhasil menurunkan stunting hingga 20 persen menjadi 24 persen di bulan Februari 2023 dalam kurun waktu satu tahun. Namun terdapat inkonsistensi dari data e PPGBM yang biasa dijadikan acuan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, konsep satu data stunting, refokusing anggaran untuk peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi merupakan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kata kunci : stunting, sumba barat daya, implementasi kebijakan

ABSTRACT

Indonesia's stunting prevalence status based on the 2022 SGGI is 21.6 percent, which exceeds the limit set by WHO. In addition, the 2030 demographic bonus, which is expected to drive the engine of the economy, is currently 180 million toddlers who fall into the stunting category. Various efforts have been made by the central and regional governments to achieve the target of reducing stunting by 14 percent according to the RPJMN. Both support from regulatory, or budgetary aspects, however, to deal with the stunting problem requires multi-stakeholder and multi-sectoral commitment and involvement. Sumba Barat Daya as the Regency that has the highest stunting status rate of 44.8 percent in February 2022 has also shown great efforts in overcoming the problem of stunting. By issuing a policies "Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa", budget allocation comes from physical DAK, non-physical DAK, and APBDdes, and a TPPS team has been formed down to the village level. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented in Sumba Barat Daya through literature studies and qualitative analysis of the results of confirmation with the Ministry of Health, Bappenas,

BKKBN, Health Office and Bapperida of Sumba Barat Daya. The findings from this study are that Sumba Barat Daya Regency has succeeded in reducing stunting by 20 percent to 24 percent in February 2023 within one year. However, there are inconsistencies from the e PPGBM data which is usually used as a reference by Southwest Sumba Regency. Therefore, the concept of one stunting data, refocusing the budget to improve the quality of human resources, and optimizing the monitoring and evaluation function are policy recommendations that can be implemented in Sumba Barat Daya Regency.

Keywords : stunting, sumba barat daya, policy, implementation.

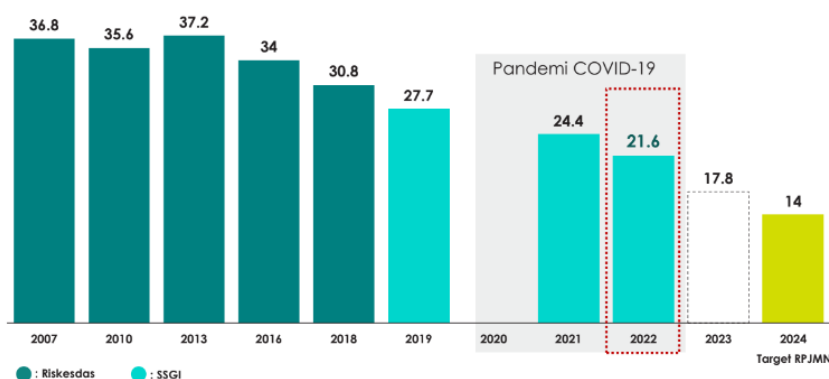
I. PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Terlebih lagi, status prevalensi stunting Indonesia berdasarkan data SSGI Tahun 2022 mencapai 21,6 persen. Padahal WHO menetapkan batasan prevalensi stunting adalah 20 persen. Artinya, jika melebihi 20 persen, maka permasalahan stunting di Indonesia sudah masuk dalam kategori kronis. Perlu penanganan khusus terutama dari pemerintah karena ini merupakan masalah nasional yang perlu diantisipasi bersama.

Apabila dikaitkan dengan proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan usia, sebanyak 70 persen penduduk Indonesia di tahun 2030 berada pada usia produktif yaitu antara usia 15 – 64. Tentu ini merupakan berkah 2030 yang dikenal dengan istilah bonus demografi, namun bisa juga menjadi malapetaka. Karena sebanyak 180 juta jiwa yang diperkirakan akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, merupakan balita saat ini yang persentase balita penderita stuntingnya cukup tinggi (Kementerian Kesehatan, 2022). Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah yang cepat dan tepat, maka alih – alih menjadi berkah, sebaliknya gemuknya penduduk usia produktif ini justru menjadi beban.

Situasi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2007 hingga saat ini, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2022, angka stunting mengalami penurunan menjadi 21,6%. Hingga saat ini, percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi berbagai intervensi terus dilakukan agar mencapai target penurunan menjadi 14% pada tahun 2024 (grafik 1).

Angka stunting SSGI turun dari 24.4% di 2021 menjadi 21.6% di 2022



Grafik 1. Tren Penurunan Stunting di Indonesia

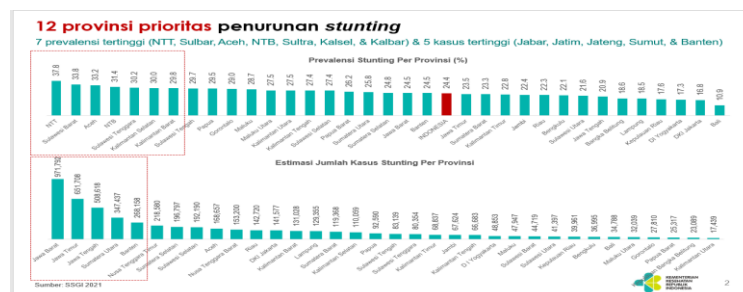
Sumber : Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2022

Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden ini

merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan penurunan stunting sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil 2018 – 2024. Melalui Perpres 72 tahun 2021 ini juga, fokus program sudah jelas disebutkan menyasar pada program stunting. Selain dukungan kebijakan, dari sisi kelembagaan, pemerintah pun membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. Selain itu tersedia juga SATGAS di tingkat pusat sampai desa yang berfungsi menjadi katalisator dan eksekutor. Penurunan stunting pun juga sudah menjadi prioritas nasional yang mana masuk dalam RPJMN 2020 – 2024, RKP 2021, RKP 2022, RKP 2023 sebagai proyek prioritas dan major project dengan target 14 persen di tahun 2024. Sedangkan dalam RKP 2023 target penurunan adalah 17.5 persen di 2023. Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas dalam FGD penurunan angka stunting (2022) menyampaikan bahwa untuk mencapai target di 2024, maka perlu percepatan penurunan stunting 10.4 persen dalam 3 tahun, yang artinya per tahunnya harus mencapai 3.5 persen per tahun. Tugas ini merupakan tugas berat yang memerlukan konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen baik dari pusat hingga ke daerah.

II. DESKRIPSI MASALAH

Apabila melihat data tren stunting di Indonesia, lebih dalam lagi hingga ke level daerah, berdasarkan data SGGI (2021) lebih dari separuh kasus stunting nasional sebanyak 69% atau 3,66 juta balita terjadi di 12 provinsi (grafik 2). 7 Provinsi dengan prevalensi tertinggi diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, sedangkan 5 kasus Provinsi tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.



Grafik 2. 12 Provinsi Prioritas Penurunan Stunting

Sumber : Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2022

Dalam penanggulangan dengan 12 prioritas Provinsi ini tentu perlu staregi kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik permasalahan daerahnya. Karena walaupun objeknya adalah penurunan angka stunting, namun permasalahan stunting itu sendiri sangat kompleks dan akan sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, sering terjadinya perbedaan data yang akurat diduga adanya kepentingan tertentu. Sebagai contoh, dalam kajian ini diangkat satu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki angka status stunting tertinggi yakni 44 persen di bulan Februari tahun 2022 (Data Balita Stunting Hasil e-PPGBM Kabupaten Sumba Barat Daya).

Berdasarkan hasil konfirmasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023, akar permasalahan dari tingginya stunting di Kabupaten ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kemiskinan ekstrem : Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten terpilih

pada program penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Sumba Barat Daya sangat tinggi sebesar 16 persen (TNP2K, 2022). Kemiskinan ekstrem sangat berkaitan erat dengan stunting karena rendahnya pendapatan sebagian besar masyarakat di Sumba Barat Daya sehingga tidak mampu memenuhi asupan makanan yang bergizi sehari – harinya.

2. Sosial Budaya : terjadinya perkawinan incest antar keluarga dekat. Perkawinan incest tersebut disebabkan dalam satu rumah, hidup beberapa keluarga dengan kondisi rumah tanpa batas privasi dan tidak dilengkapi pintu kamar dan pencahayaan yang kurang. Penyelesaian dari kondisi ini ternyata hanya diselesaikan dengan hukum adat sehingga tidak ada efek jera dan kejadian terus berulang sehingga berakibat pada kelahiran keturunan dengan kondisi buruk atau bahkan mengalami disabilitas.
3. Pendidikan : tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi pola asuh anak, seperti kurangnya pemahaman literasi dan pengetahuan pangan dan gizi yang sehat dan seimbang. Selain itu, di Sumba Barat Daya, pada beberapa kasus ibu menjadi tulang punggung keluarga, sehingga anak diasuh oleh neneknya yang juga memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.
4. Kesehatan : kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Selain permasalahan di atas, perlu menjadi perhatian adalah apakah program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya penurunan stunting di Sumba Barat Daya sudah tepat. Karena telah banyak program yang dilaksanakan di tahun 2022 seperti operasi timbang, launching dapur bersama, pelaksanaan pencahangan bulan posyandu, dan telah terbentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Berangkat dari hal tersebut maka perlu disusun sebuah naskah kebijakan sehingga dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka menurunkan angka stunting sesuai dengan karakteristik permasalahan daerah.

III. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur yang membahas terkait permasalahan stunting baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun Kabupaten Sumba Barat Daya sudah ada, namun belum banyak. Toda dkk (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masalah stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih dominan di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan evaluasi lapangan ditemukan adanya upaya lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Sumba Barat Daya yang terkait dengan proses percepatan penanggulangan stunting, dikenal dengan istilah konvergensi menggunakan 20 indikator nasional, terbagi menjadi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Penelitian yang berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Palla menyebutkan bahwa tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, riwayat penyakit infeksi balita, dan pola konsumsi memiliki hubungan dengan kejadian stunting di wilayah Kecamatan Wawewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

Chandra dkk (2019) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan tingginya stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kurangnya balita mengkonsumsi protein hewani. Dalam penelitiannya teridentifikasi sumber – sumber protein yang dapat dijadikan salah satu sumber makanan yang dapat diakses masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni ikan laut dan daun kelor. Penelitian ini menghasilkan produk inovasi berbasis pangan lokal berupa bakso ikan kelor, nugget ikan kelor, cookies kelor, dan bubur “rowe luwa”kelor. Pada tahun 2021 penelitian dilakukan kembali fokus pada pengembangan bubur instant “rowe luwa”.

Rowe Luwa merupakan makanan khas masyarakat Sumba Barat Daya yang terbuat dari tepung beras dan daun singkong yang dihaluskan. Masyarakat Sumba Barat Daya telah terbiasa mengkonsumsi Rowe Luwa baik untuk makanan sehari-hari maupun acara perjamuan penting. Rowe Luwa yang ada saat ini adalah berbentuk makanan basah. Inovasi pangan lokal Rowe Luwa instan yang diperkaya ikan laut dan daun kelor akan meningkatkan nilai gizi produk dan meningkatkan daya terima masyarakat Sumba Barat Daya. Penyajiannya yang praktis memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi produk sehingga diharapkan percepatan penanganan stunting dapat terwujud. Namun

akibat pandemi covid19 di tahun 2020, kegiatan penelitian berupa transfer teknologi tepat guna kepada UMKM dan ibu PKK dilaksanakan secara online berupa video dan modul. Namun kegiatan ini masih belum optimal, dan perlu keberlanjutan program.

Terkait dengan evaluasi program penanggulangan stunting melalui konvergensi aksi di Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilakukan oleh Picauly dkk (2019), ditemukan beberapa fakta menarik mengenai kinerja OPD di Sumba Barat Daya dalam penanganan stunting pada program konvergensi aksi pada tabel 1. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa masih rendahnya pemahaman ASN mengenai stunting serta fungsi konvergensi dan pelaksanaksanaan di lintas sektor (OPD) yang masih buruk.

Tabel 1. Identifikasi dan Klarifikasi Aktivitas OPD Sumba Barat Daya terkait Fungsi Konvergensi

No	INDIKATOR KEGIATAN	TEMUAN	KLARIFIKASI	KOMITMEN
1	Pertemuan berkala tim Sekber/Pokja kabupaten	Pertemuan berkala tim Sekber/Pokja kabupaten Tidak ada	Akan dilaksanakan per triwulan	Setuju dibawah monitoring Bappeda
2	Data 20 indikator tidak lengkap	Sebagian besar pekerjaan terkait konvergensi dikerjakan oleh teman-teman di dinas kesehatan. Bahkan semua data terkait aksi konvergensi dikumpulkan oleh tim dinas kesehatan kabupaten SBD	Tim Pokja Propinsi melakukan pendampingan dalam mengumpulkan dan menginput data	Setuju dibawah monitoring Bappeda
3	Data 20 indikator tidak lengkap	Masih ada OPD selain Dinkes, belum paham, data apa yang harus kumpulkan dilapangan dan bagaimana cara mengolahnya	Tim Pokja Propinsi melakukan pendampingan dalam mengumpulkan dan menginput data	Setuju dibawah monitoring Bappeda
4	Sarana dan ketersediaan Air bersih	Keterbatasan air bersih dilapangan	PU dan PR sdh memfasilitasi pembuatan sarana prasarana air bersih dan sehat 500 titik di tahun 2021	Setuju dan siap dikerjakan dibawah monitoring Bappeda, PU/PR
5	Tenaga gizi lapangan	Kader posyandu kewalahan dengan jumlah keluarga 1000 HPK yang banyak dan luasnya jangkauan wilayah kerja	Perekrutan tenaga gizi dan sarana pendamping desa serta penguatan kapasitas KPM	Setuju dan siap dikerjakan dibawah monitoring Bappeda, PMD, Dinkes
6	Input data EPPBGM dan data 20 Indikator stunting	Tenaga Operator input data ke Bangsa Propinsi dan Pusat sering berganti	Perekrutan staf / operator independent	Setuju dibawah monitoring Bappeda dan Dinkes

Sumber : Picauly dkk (2019)

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode penelitian kualitatif, dimana Abudussamad (2021) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif memiliki penekanan pada makna dari pada generalisasi. Begitu juga Strauss dan Corbin (2015), bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu Penanganan Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yin (2013) menjelaskan, studi kasus digunakan untuk penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek baik itu seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, ataupun suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian yang berkaitan dengan penelitian terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu. Studi kasus dapat juga berupa kombinasi metode pengumpulan data seperti arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi. Data/ bukti dapat berbentuk data kualitatif (kata-kata) maupun kuantitatif (angka-angka).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD), wawancara, dan zoom meeting bersama narasumber yang mewakili pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, Bappenas dan BKKBN. Perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Dinas Kesehatan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil pengumpulan data

tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga disusun sebuah rekomendasi untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Sumba Barat Daya

Secara astronomis wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara koordinat 9o,18'-10o, 20' LS (Lintang Selatan) dan 118o,55'-120o,23' BT (Bujur Timur). Secara geografis tepat berada diantara 9018'01" Lintang Selatan dan 1800 55'-1200 23 Bujur Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan - kecamatan tersebut antara lain Kodi, Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur, dan Wewewa Utara.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 303.650 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 155.716 jiwa dan perempuan sebanyak 147.935 jiwa dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 62,29. Dari total penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, sebanyak 100.420 jiwa atau 28,18% tergolong penduduk miskin. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Sumba Barat Daya atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 7.704 atau 1,25% Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,04%. Data tersebut dapat tergambar pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Karakteristik Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan Jumlah Penduduk, IPM, Penduduk Miskin, PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)		IPM	Jumlah Penduduk Miskin		Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Laki	Perempuan		Ribu Jiwa	%	Rupiah	%	
1.	Kabupaten Sumba Barat Daya	155.716	147.935	62,29	100.42	28,18	7.704	1,25	2,04
Total		303.650							

Sumber : BPS NTT 2021 dan Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021.

Sebagaimana tercantum dalam proposal urgensi pembentukan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya (2022), beberapa isu krusial yang dihadapi Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Sumba Barat Daya menempati peringkat 13 Indeks Keparahan Kemiskinan se- Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai indeks 1,10 di Tahun 2021.
2. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 28,18% tahun 2021 menempati peringkat 19 se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 62,29 tahun 2021 menduduki peringkat 16 se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Kabupaten Sumba Barat Daya menempati peringkat ke 2 untuk Tertinggi Stunting se- Prov. NTT dengan jumlah kasus 13.150 (44%) per Februari 2022.

Keempat permasalahan tersebut tentu sangat berkaitan dengan stunting, yang mana dalam penyelesaiannya melibatkan berbagai sektor. Sementara itu, program dan kebijakan yang ada selama ini masih bersifat rutinitas dan minim inovasi. Akibatnya, sejak tahun 2007 Kabupaten Sumba Barat Daya berdiri menjadi daerah otonom, dengan miliaran anggaran APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat, masih belum memperlihatkan dampak yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Sumba Barat Daya tergolong ke dalam daerah tertinggal berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024.

2. Kondisi Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya

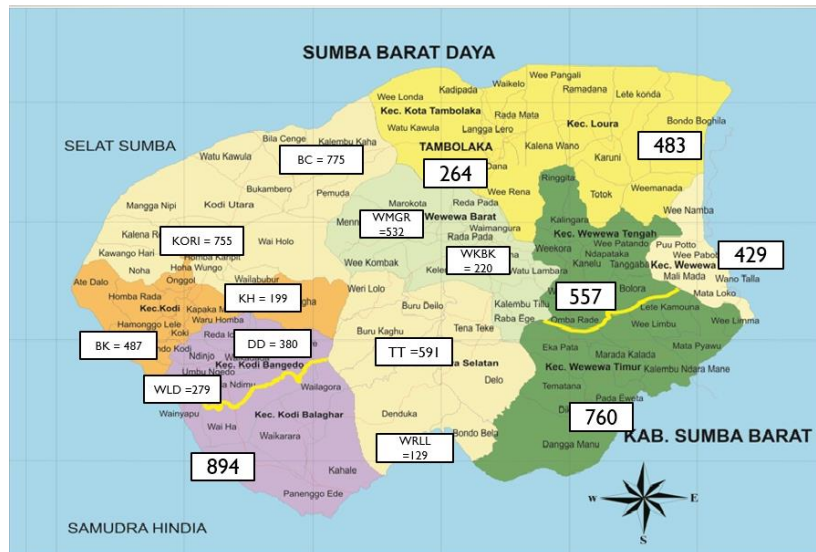
Kondisi stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami perkembangan yang cukup dinamis (tabel 3). Dapat terlihat pada tabel 2, terjadi inkonsistensi data antara agustus 2021 dimana persentase balita stunting adalah 6.360, sedangkan di bulan Februari persentase menurun menjadi 24 persen akan tetapi jumlah balitanya sebesar 7.734 yang mana justru lebih banyak dibandingkan jumlah balita di bulan Februari 2021, padahal secara persentase lebih kecil.

Tabel 3. Kondisi Stunting Sumba Barat Daya

Tahun	Jumlah Balita Stunting	Persentase Balita Stunting (%)
Agustus 2021	6.360	31,25
Februari 2022	13.150	44,28
Agustus 2022	8.270	24,28
Februari 2023	7.734	24,00

Sumber : e PPGBM Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023

Sementara itu secara terperinci jumlah balita stunting hasil operasi timbang data e PPGBM bulan Februari 2023 dari masing – masing kecamatan dapat dilihat di gambar 3. Pada gambar 1, jumlah balita terbanyak yang mengalami kondisi stunting berada di kecamatan Kodi Utara, yang mana sesuai dengan informasi hasil wawancara bersama narasumber dengan jumlah balita stunting sebanyak 1.590. Di posisi ke-2, kecamatan Kodi Balaghar sebanyak 894, dan posisi ke-3 kecamatan Wawewa Timur sebanyak 760 balita.



Gambar 1. Jumlah Bayi Stunting Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya Februari 2023

Sumber : e PPGBM, 2023

Adapun penelitian Ade Chandra dkk (2019) menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya stunting di Sumba Barat Daya, meliputi: (1) pola asuh, disebabkan menikah usia muda antara 14-15 tahun. Sehingga pengetahuan gizi dari ibu muda relatif rendah, terutama terhadap penyediaan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga; (2) pola makan yang terkait dengan kurangnya mengonsumsi sumber protein. Biasanya, konsumsi sumber protein hewani dilakukan pada saat pesta kematian dan perkawinan, dan daging lebih banyak dikonsumsi kepala keluarga (orang tua), sedangkan anak-anak mendapatkan porsi yang sedikit; (3) kemiskinan, untuk menutupi biaya hidup dilakukan dengan berhutang, pada saat masa tempo hutang tidak terbayar, sebagai jaminan, anak gadis yang baru berusia 14-15 tahun dinikahkan secara adat; serta (4) kurangnya fasilitas air dan sanitasi, menyebabkan tingginya prevalensi penyakit cacingan pada anak-anak di Sumba Barat Daya (94,6%). Edukasi pola hidup bersih dan pengetahuan gizi terbatas dilakukan oleh ahli gizi atau tenaga kesehatan di Puskesmas; serta (5) adat istiadat dan budaya, hal ini berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, dikarenakan warisan nenek moyang melakukan penyembelihan hewan pada saat pesta kematian, sedangkan konsumsi sehari-hari hanya terhadap sumber karbohidrat dari beras, jagung, dan umbi-umbian.

Contoh kondisi balita yang paling memprihatinkan diungkapkan oleh Herminiati (2018) dalam penelitiannya di Desa Waitaru Kecamatan Kodi. Seorang anak perempuan usia 7 tahun 9 bulan (pada bulan November 2018), tinggi badan nya hanya 71 cm dan berat badan 5,7 kg, merupakan anak ke-3. Ditambah lagi, dia memiliki adik laki-laki yang berusia 12 bulan sebagai anak ke-5, panjang badan nya 50 cm dan berat badan 2,5 kg. Berdasarkan informasi dari ibunya, saat hamil, mengalami kesulitan untuk mengonsumsi makanan padat karena merasa mual. Sehingga selama berlangsung masa kehamilan lebih sering mengonsumsi air kelapa. Salah satunya terkait faktor kemiskinan, karena kurangnya kemampuan ekonomi dari kepala keluarga untuk menanggung 5 anak sebagai anggota keluarga.

3. Implementasi Kebijakan terkait Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan bersama Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan BKKBN pada tanggal 19 Juli 2022, beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dapat dirangkum sebagai berikut (tabel 4) :

Tabel 4. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Stunting

Aspek	Penjelasan
Regulasi	- Peraturan Presiden Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 5 strategi nasional: Pilar 1: komitmen dan visi kepemimpinan Pilar 2: komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; Pilar 3: konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; Pilar 4: peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan Pilar 5: penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi - Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024 - Penyediaan Data : ✓ Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga 2021 dan pemutakhirannya untuk memetakan keluarga berisiko stunting secara real time - Pendampingan ✓ Pendampingan oleh 200 ribu Tim Pendamping Keluarga ✓ TPK sudah dilatih pd thn 2021 dan akan ada pelatihan pendalaman pd thn 2022 - Surveilans keluarga berisiko stunting ✓ Penggunaan aplikasi elsimil + e PPGBM - Audit Kasus Stunting ✓ Mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. ✓ Ada anggarannya di BOKB kab/ kota serta BKKBN provinsi, dilakukan bersama pakar.
Kelembagaan	- Provinsi: Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) - Kab/kota: Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) - Kecamatan: TPPS Kecamatan - Desa/kelurahan: TPPS Desa/Kelurahan - Ada SATGAS Prov dan Kab/Kota yang membantu TPPS
Aggaran	- Intervensi spesifik diarahkan mendekati 25% - Intervensi sensitive diarahkan mendekati 70% - Koordinasi, pendampingan dan dukungan teknis diarahkan menjadi $\pm 5\%$

Sumber : Surbakti, Indra BKKBN dalam FGD Penanganan Stunting, 2022

Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat di atas, maka diidentifikasi dan dianalisis kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait penanganan stunting sebagai berikut (tabel 5) :

Tabel 5. Analisis Implementasi Kebijakan terkait Penanganan Stunting di Sumba Barat Daya

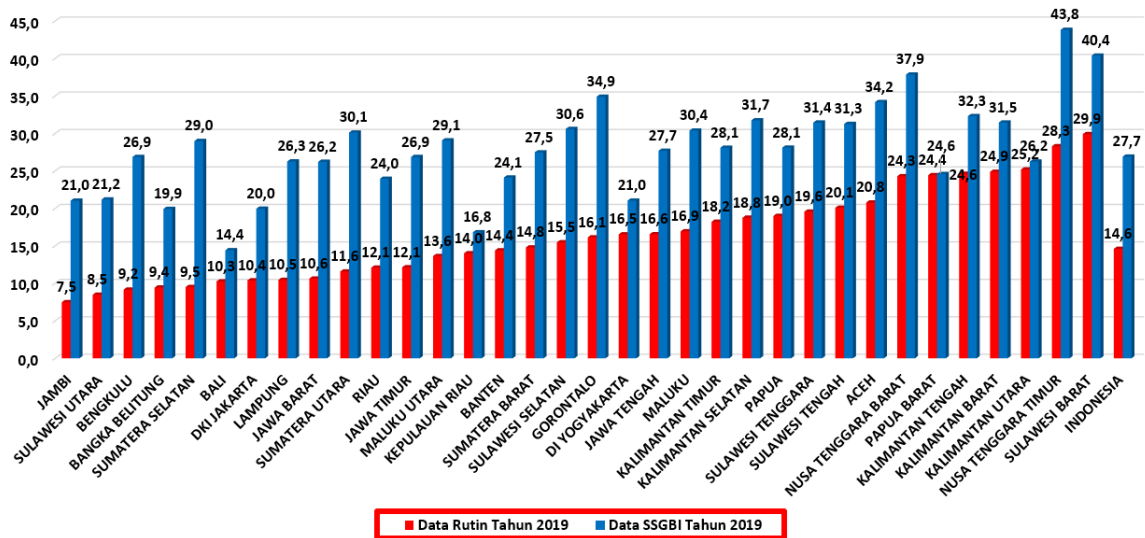
Aspek Analisis	Kondisi Existing	Implementasi
1. Komitmen Seluruh Aktor Terkait	Kab. Sumba Barat Daya berkomitmen pada tahun 2024 penurunan stunting menjadi dibawah 14 %	1. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebab Stunting 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Posyandu 3. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kesehata, penyuluh, maupun pendamping
4. Perencanaan	Perencanaan Penanganan Stunting pada Kab. Sumba Barat Daya mengacu pada 7 Program Unggulan daerah 2024 yang salah satunya adalah DESA SEHAT	1. Masih rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang ada 2. Kurangnya sosialisasi regulasi hingga ke tingkat bawah 3. Perlunya revisi regulasi yang ada
5. Regulasi	1. PERBUP Sumba Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa 2. SK tentang Pendampingan Desa/Kelurahan Nomor 291 Tahun 2022 3. SK Kabupaten No 137 Tahun 2022 Tentang Pembentukan TPPS 4. SK Audit Kasus Stunting No. 12b Tahun 2022 5. MOU Kerjasama Lintas Agama Terkait Edukasi Stunting Kepada Calon	1. Kurangnya program pendukung penanganan stunting : program yang sudah dilaksanakan pendampingan seluruh OPD operasi timbang, dapur bersama untuk PMT, pelaksanaan bulan posyandu, 2. Kurang sinkronnya perencanaan dari kabupaten hingga ke desa

	Pengantin untuk pencegahan Stunting dari Hulu 6. NKS BRIN dan Pemkab SBD Nomor 162/I/KS/12/2022 dan Nomor 50/MOU/HK/2022 tanggal 14 Desember 2022	
7. Anggaran	Penganggaran dalam upaya penurunan Stunting sebagian besar masih didukung oleh DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Dukungan APBDes	1. Total Anggaran untuk Aksi Konvergensi 2020 : 25.718.529.051 2. Total Anggaran untuk Aksi Konvergensi 2021 : 59.762.298.624 3. Perlunya Refokusing APBD Kab. Sumba Barat Daya
8. SDM TPPS & TPK	1. Telah terbentuk tim TPPS dan TPK sesuai SK Bupati	1. Anggota TPPS dan TPK Belum Mamahami Tugas Pokok dan Fungsi 2. Kurangnya Sosialisasi TPPS Tk. Kabupaten Hingga Tk. Desa
9. Data	1. Data mengacu pada e PPBGM	1. Belum tersedianya bank data 2. Faktor SDM dan alat ukur yang belum terstandar
10. Koordinasi dan Monev	1. Berbagai tim telah dibentuk	1. Masih terdapat ego sektoral 2. Masih kurangnya komunikasi di tingkat Kabupaten sampai Tingkat desa 3. Kurangnya Partisipasi Pemerintah desa dalam Pelaksanaan Posyandu 4. Kurangnya monitoring pelaksanaan posyandu

Sumber : hasil olahan data, 2023

Dari semua aspek kebijakan di atas, salah satu hal penting namun seringkali terlupakan adalah pentingnya sumber data. Data yang akurat, akan membantu pemangku kebijakan

dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Seperti telah diuraikan di atas, Kabupaten Sumba Barat Daya masih mengacu pada data ePPGBM, dan ditemukan data yang tidak konsisten. Namun ketidakkonsistenan data ini tidak hanya terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya, namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Pada grafik 3 terlihat perbedaan data yang signifikan dari sumber data yang biasa dijadikan acuan, yaitu ePPGBM dan SSGBI. Perbedaan yang cukup signifikan ini tentu akan membuat bingung para pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah dan solusi yang tepat bagi permasalahan stunting di daerah.



Data Rutin=ePencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM)

Grafik 3. Perbandingan Angka Stunting Data Survei (SSGBI dan ePPGBM) Tahun 2019

Sumber : Surbakti, Indra BKKBN dalam FGD Penanganan Stunting, 2022

Berikut perbandingan data yang biasa dijadikan acuan pengukuran stunting berikut perbedaan, permasalahan yang dihadapi, beserta solusinya (tabel 6):

Tabel 6. Perbandingan Data Acuan Stunting

NO	JENIS	SUMBER DATA	PELAKSANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Survei	Riskesmas dan SSGI	- Balitbangkes - BPS - Dinas Kesehatan Provinsi - Dinas Kesehatan Kab/Kota - Enumerator	Butuh anggaran besar untuk keterwakilan nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Keterlibatan berbagai pihak untuk mengurangi besaran anggaran tanpa mengabaikan standar riset
2	Data rutin	e-PPGBM	- Direktorat Gizi Masyarakat - Dinas Kesehatan Provinsi - Dinas Kesehatan Kab/Kota - Puskesmas - Kader	Sistem pemantauan pertumbuhan belum terstandar dengan baik : 1. ketersediaan timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan belum semua terpenuhi dan terstandar 2. Kemampuan petugas pengumpul data (kader) belum terstandar 3. Coverage balita yang ditimbang masih <60% 4. Kecepatan ketersediaan data tepat waktu masih rendah	Penguatan Sistem Pemantauan Pertumbuhan : - Pengorganisasian - Juknis/Pedoman - Ketersediaan dan kualitas alat antropometri (timbangan BB dan alat ukur TB) - SDM (Pengelola Gizi Prov, Kab/Kota, Puskesmas, Desa (KPM, PKK, kader, & Keluarga) - Pelatihan - Sistem informasi dan teknologi

Sumber : Sumber : Surbakti, Indra BKKBN dalam FGD Penanganan Stunting, 2022

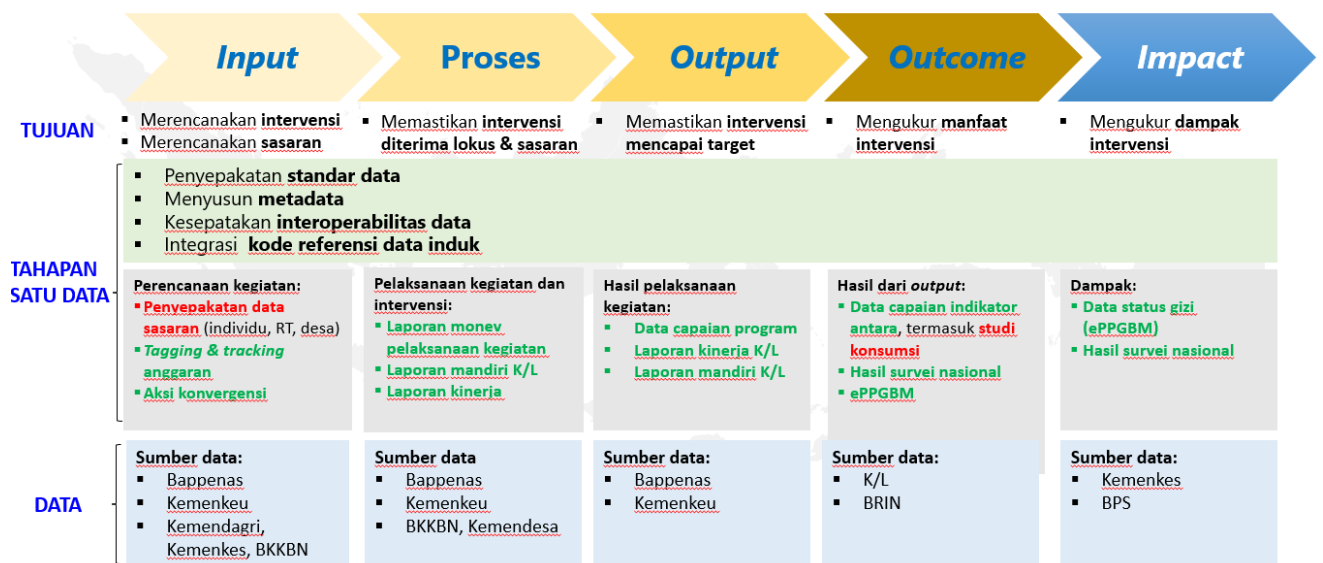
Dari tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa data e PPGBM yang menjadi sumber acuan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam penanganan status stunting, mengalami beberapa permasalahan, yakni kemampuan pengumpul data (kader) dan ketersediaan alat ukur yang belum terstandar. Hal ini sejalan dengan konfirmasi yang dilakukan bersama Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya.

VI. ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari kondisi stunting dan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Apabila melihat capaian kondisi stunting berdasarkan data e PPGBM Februari 2023 yang menurun menjadi 24 persen dari 44,8 persen di bulan Februari 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah sukses menurunkan angka stunting sebanyak 20 persen dalam kurun waktu satu tahun. Namun melihat adanya inkonsistensi data antara bulan Agustus 2021, dengan persentase lebih besar dibandingkan angka stunting di Februari 2023, yaitu sebesar 31,25 dengan jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 6.360. Sedangkan saat Februari 2023 walaupun persentase sebesar 24 persen, akan tetapi jumlah balita justru lebih banyak yaitu 7.734. Oleh karena itu perlu adanya konfirmasi kembali mengenai keakuratan data tersebut. Terjadinya hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor SDM tenaga kesehatan, penyuluh, dan pendamping keluarga serta alat ukur yang tidak terstandar.
2. Semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat telah dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya, seperti dukungan regulasi, kelembagaan, hingga anggaran yang cukup besar, bahkan banyak bantuan baik dari Kementerian pusat maupun lembaga lainnya, seperti NGO. Namun hingga kini permasalahan stunting masih belum terselesaikan dengan baik. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara tingkat kabupaten hingga ke level desa. Selain itu pula, banyaknya program yang telah dilaksanakan Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebatas memadamkan api, namun tidak ada keberlanjutan dari program tersebut. Sehingga fungsi monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal.

Maka skenario alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah konsep satu data stunting (gambar 2). Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi, serta digunakan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi data induk. Melalui konsep satu data ini, diharapkan seluruh proses dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi dapat berjalan transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Skenario Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Konsep Satu Data Stunting

Sumber : Ali, Pungkas Paparan Bappenas dalam FGD Penanganan Stunting, 2022

VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk permasalahan data, sesuai dengan Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) antara BRIN dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 162/I/KS/12/2022 dan Nomor 50/MOU/HK/2022 tanggal 14 Desember 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat berkoordinasi dengan BRIN untuk pengelolaan data satu pintu sebagaimana skenario konsep data satu data stunting yang menekankan keterlibatan berbagai pihak.
2. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu meredesign ulang postur anggaran khususnya terkait peningkatan SDM tenaga kesehatan, dinas terkait, penyuluh, pendamping keluarga, agar program baik yang sudah disusun sesuai perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program terkait stunting harus dioptimalkan, melalui konsep satu data stunting sehingga dampak keberlanjutan program dapat terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Abudussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. ISBN 978-623-97534-3-6 Cetakan I, Desember 2021. CV. Syakir Media Press.

- Ali, Pungkas. (2022). Kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting. Disampaikan dalam FGD Peranan BRIDA dalam Mendudukkan Penurunan Kasus Stunting di Indonesia. Jakarta: 19 Juli 2022.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2022). Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2022. Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Balitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022). Proposal Urgensi Pembentukan Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bapperida Sumba Barat Daya. (2023). Program, Kegiatan, dan Kebijakan Terkait Diseminasi dan Pemanfaatan Teknologi Dalam Penurunan Angka Stunting. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jakarta: 20 Maret 2023.
- Chandra dkk. (2019). Pengembangan Inovasi Pangan Lokal Berbasis Daun Kelor Dan Ikan Laut Untuk Mendukung Program Penanganan “Stunting” Di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jakarta : LIPI.
- Chandra dkk (2021). Pengembangan Inovasi Pangan Lokal “Rowe Luwa” Instan Yang Diperkaya Ikan Laut Dan Daun Kelor Untuk Mendukung Percepatan Penanganan Stunting Di Kab. Sumba Barat Daya, NTT. Jakarta : LPDP.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hermiati, A. 2018. Kondisi Balita Stunting di Sumba Barat Daya. Laporan Perjalanan Dinas. November 2018. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna – LIPI Subang.
- Kementerian Kesehatan. (2022). Peranan BRIDA dalam Mendukung Penurunan Kasus Stunting di Indonesia. Disampaikan dalam FGD Peranan BRIDA dalam Mendudukkan Penurunan Kasus Stunting di Indonesia. Jakarta: 19 Juli 2022.
- Surbakti, Indra. (2022). Program dan Kegiatan Penurunan Stunting BKKBN di Indonesia. Disampaikan dalam FGD Peranan BRIDA dalam Mendudukkan Penurunan Kasus Stunting di Indonesia. Jakarta: 19 Juli 2022.
- Toda dkk. (2022). Factors Related to Stunting in The Working Area of Palla Community Health Center, Southwest Sumba Regency. Lontar: Journal of Community Health June 2022 Vol. 4 (No. 2): p. 125 – 135.
- Picauly dkk. (2019). Assistance 25 Indicators Of Acceleration Of Stunting Reduction in Sumba Barat Daya District Province Of East Nusa Tenggara. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat e-ISSN : 2746 – 2234.
- Yin, R.K. (2013) Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil 2018 – 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

BPS NTT. (2021). Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021.

E PPGBM Sumba Barat Daya 2022.

E PPGBM Sumba Barat Daya 2023.